



Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi

Oleh:

Mochammad Farisi¹, Rio Yusri Maulana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi Indonesia.

²Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

¹mochammadfarisi@unja.ac.id

Keywords:

*Volunteer
Democracy; 2019
Elections;
community
participation*

Abstract

The volunteer democracy program is a social movement intended to increase voter participation and quality in exercising their voting rights. This program involves the widest possible participation of the community where they are placed as pioneers of democracy for their communities. Democracy volunteers become KPU partners in carrying out the agenda of outreach and voter education based in districts/cities. This form of community participation is expected to be able to encourage the growth of high awareness and full responsibility of the community to use their rights in elections optimally. The Democracy Volunteer Program initiated by the KPU involved community groups from 11 (eleven) strategic voter bases, namely; family base, novice voter base, young voter base, women voter base, disabled people base, special needs voter base, marginal people base, community base, religious base, internet citizen base, and democratic volunteer base. Relationships will be formed on each basis which will then become extension agents in each community. The Relationship Program is motivated by the level of voter participation which tends to decline, the last four national elections and the implementation of post-conflict local elections in various regions show that indication, namely the 1999 election (93%), the 2004 election (84.1%), the 2009 election (70.9%), 2014 election (75.11%). The trend of decreasing participation is a challenge for the KPU on how to increase participation in the 2019 Election, for this reason, this article explains what the factors are causing the decline in voter participation and how the Relation strategy is to increase voter participation in the 2019 Election in Jambi

Kata Kunci:

*Relawan
Demokrasi;
Pemilu 2019;*

Abstrak

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan

Partisipasi
Masyarakat

peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis di kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu; basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Relasi akan dibentuk disetiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Program Relasi dilatarbelakangi oleh tingkat partisipasi pemilih yang cenderung menurun, empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu yaitu pemilu 1999 (93%), pemilu 2004 (84,1%), pemilu 2009 (70,9%), pemilu 2014 (75,11%). Tren menurunnya partisipasi menjadi tantangan bagi KPU bagaimana meningkatkan partisipasi di Pemilu 2019, untuk itu artikel ini menjelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih dan bagaimana strategi Relasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Jambi.

Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandate kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Sulastono:2001). Sedangkan menurut Praktikno pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat (Pratikno: 2004).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Umum, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah,serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan

rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan pengertian diatas, peran publik, pemilih dan warga negara tidak bisa diabaikan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu faktor untuk menilai sejauh mana kualitas pemilu itu diselenggarakan. Partisipasi tidak sekadar persoalan seberapa tinggi tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara, tetapi juga sejauh mana penggunaan hak pilih tersebut dilakukan atas kesadaran sebagai pemilih.

Salah satu hal yang selalu ditunggu dan dihitung selain hasil pemilu adalah angka partisipasi pemilih di dalam penyelenggaraan pemilu. Angka partisipasi pemilih, setidaknya akan menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga dalam kontestasi suatu pemilu. Jika ingin dilihat dari sisi lain, angka partisipasi pemilih ini juga akan menjelaskan kekuatan legitimasi dari orang yang terpilih melalui proses pemilu yang dilakukan. Karena pada hakikatnya, proses pemilu adalah bentuk penyerahan mandat dari pemilih kepada yang dipilih, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Berangkat dari itu, tingkat partisipasi pemilih mestinya menjadi entitas penting yang mesti dijaga dan ditingkatkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa peningkatan angka partisipasi pemilih menjadi penting untuk diupayakan? Sebab tingginya angka partisipasi pemilih menjadi potret pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan

saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat (Aprizal: 2019).

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (93%), pemilu 2004 (84,1%), pemilu 2009 (70,9%), pemilu 2014 (75,11%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya (KPU RI: 2016). Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Pemilu 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya (KPU RI: 2019).

Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta bagaimana peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Provinsi Jambi, serta memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan atau aktifitas yang dilakukan relawan demokrasi dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi. seperti; keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih dan pemantauan pemilihan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Menurut Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

KPU sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu di Indonesia sesungguhnya sangat sederhana. Pemilu bisa dianggap sukses besar jika pelaksanaannya berjalan *luber* (*langsung, umum, bebas, rahasia*) dan *jurdil* (*jujur dan adil*) serta tingkat partisipasinya tinggi. Hal yang tidak sederhana adalah mengamankan agar asas pemilu tersebut bisa terpenuhi. Bila asas *luber* dan *jurdil* bisa berlangsung dengan baik, maka ukuran berikutnya adalah pencapaian tingkat partisipasi warga (Supriyono, 2014:47).

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (*schumpetrian*), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara actor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara (Liando: 2016). Pemilu juga memberikan ruang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan hukum yang sah. Oleh karenanya, para penyelenggara Negara merupakan pengembal mandate rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat. Sebagai sarana untuk melakukan siklus pergantian pemimpin dan membentuk pemerintahan yang berkualitas, dalam pemilu masyarakat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu hal ini yang kemudian memunculkan konsekuensi makna pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Partisipasi selalu menjadi bagian penting dalam pemilu sekaligus menjadi tantangan kerja bagi penyelenggara pemilu. Tiga kali pemilu paska-reformasi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 92,6%. Penurunan tingkat partisipasi terjadi pada Pemilu 2004 yang ada pada kisaran 84,1%. Demikian juga pada Pemilu 2009, penurunan tingkat partisipasi terjadi, dimana hanya 70,9%. Jika diperhatikan terjadi tingkat penurunan yang konstan di kisaran 8-10%. Peningkatan tingkat partisipasi memang terjadi pada pemilu 2014, sebanyak 75,1% pemilih menggunakan hak pilihnya. Namun angka tersebut masih dibawah tingkat partisipasi Pemilu 2004 dan 1999 (KPU RI: 2019).

Tabel 1:

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD & Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 di Provinsi Jambi

Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Prov. Jambi		Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Prov. Jambi	
Tahun	Partisipasi %	Tahun	Partisipasi %
2004	78,58 %	2004	78,58 %
2009	74,57 %	2009	74,08 %
2014	77,25 %	2014	70,58 %
2019	85,13 %	2019	85,27%

Sumber: Laporan Evaluasi Pemilu 2019, KPU Provinsi Jambi.

Berdasarkan data diatas tingkat partisipasi masyarkat di Provinsi menurun dari Pemilu 2004 – 2014, khusus Pemilu Legislatif 2014 sempat naik diangkat 77,25% namun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden justru menurun sampai dititik terendah 70,58%. Peningkatan tajam terjadi pada Pemilu Serentak 2019 menjadi sekitar 85%. Peningkatan ini mengindikasikan peran Relasi sangat efektif meningkatkan partisipasi pemilih.

Relawan Demokrasi

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis di kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program Relawan Demokrasi (Relasi) pertama kali digagas oleh KPU pada Pemilu 2014, program ini merupakan respon atas semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih dan sekaligus merupakan strategi baru baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Relasi pada Tahun 2014 hanya dibagi dalam 5 segmen pemilih strategis yaitu: pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran (Desi Arianto: 2019). Program Relasi Pemilu 2019 mengalami pelebaran segmen, berdasarkan Pasal 5 (1) huruf a PKPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU menjadikan pemilih berbasis sebagai sasaran utama. Pemilih berbasis artinya pemilih yang memiliki basis, jaringan yang luas atau komunitas, meliputi: basis keluarga; pemilih pemula; pemilih muda; pemilih perempuan; pemilih penyandang disabilitas; pemilih berkebutuhan khusus; kaum marjinal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (netizen).

Berdasarkan pembagian basis tersebut menuntut KPU harus mampu berkreasi dan menemukan instrumen pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang kreatif, efektif, menyenangkan dan kekinian. Istilah yang dikenal sekarang sosialisasi zaman Now/electiontainment. Relasi yang dibentuk oleh KPU tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu jawaban sosialisasi pemilu zaman Now. Mereka melakukan sosialisasi berdasarkan basis mereka masing-masing, sehingga sosialisasi lebih mudah ditangkap oleh anggota komunitasnya.

Faktor Penyebab Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurun

Hasil wawancara dengan Desy Arianto, Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun 2 periode tahun 2003–2013, Komisioner KPU Provinsi Jambi Tahun 2013-2018, dan sekarang sebagai Pembina Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi, ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka partisipasi pemilu baik secara nasional maupun di daerah. Pertama golput ideologis disebabkan karena adanya paham keagamaan anti demokrasi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik (pemerintahan dan partai politik) yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, dan masyarakat sudah kehilangan harapan pada calon-calon legislatif maupun anggota DPR. Kedua adalah golput teknis yaitu masyarakat tidak berpartisipasi karena faktor tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT).

Sedangkan menurut Apnizal Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Barat selama dua periode tahun 2008-2018 yang sekarang sebagai Komisioner KPU Provinsi Jambi

Divisi Sosialisasi penyebab menurunnya angka partisipatif pemilu adalah 3 faktor: pertama faktor non teknis yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat terkait pentingnya pemilu, sehingga pada saat mereka tidak terdaftar dalam DPT mereka juga tidak peduli. Kedua faktor teknis yaitu tidak validnya data kependudukan dan diperparah dengan tidak maksimalnya pekerjaan Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP), kondisi geografis yang susah dijangkau dan cuaca buruk saat hari pencoblosan. Faktor ketiga yaitu faktor politis dimana masyarakat sudah apatis tidak percaya lagi kepada calon peserta pemilu karena bermasalah seperti terlibat korupsi, banyak pelanggaran dan tidak mempunyai visi misi yang jelas. Khusus untuk pemilih pemula, kebanyakan masih menganggap pemilu itu menyulitkan. Kurangnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula tentang partai politik dan calon-calon anggota legislatifnya acapkali menyulitkan mereka untuk memilih.

Strategi Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Jambi

Program Relawan Demokrasi di Provinsi Jambi melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu: 1. basis keluarga, 2. basis pemilih pemula, 3. basis pemilih muda, 4. basis pemilih perempuan, 5. basis penyandang disabilitas, 6. basis pemilih berkebutuhan khusus, 7. basis kaum marginal, 8. basis komunitas, 9. basis keagamaan, 10. basis warga internet dan 11. basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Jumlah relawan demokrasi maksimal 55 (lima puluh lima) orang yang mewakili keseluruhan basis pemilih dengan ketentuan setiap basis pemilih terdiri dari minimal 4 (empat) orang relawan. Relasi bekerja selama 3 bulan mulai bulan Februari samai dengan April 2019. Sebelum menjalankan tugasnya, relawan demokrasi diwajibkan mengikuti Training of Trainer (ToT) dengan materi: 1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi, 2. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis, 3. Kode etik relawan. dan 4. Teknik-teknik berkomunikasi publik. Setelah lolos ToT, tugas relawan demokrasi menyampaikan materi tersebut diatas yang telah disusun dalam sebuah modul kepada basis masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya Relawan Demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain: a. Simulasi. b. Bermain peran. c. Diskusi kelompok. d. Ceramah. e. Alat bantu (visual dan non visual). dan f. Posting materi sosialisasi ke media sosial. Mekanisme kegiatan relawan demokrasi

meliputi: a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping). b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran. c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan. d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain. e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota (Aprizal: 2019).

Berikut dijelaskan peran Relasi di 11 kabupaten/kota yang telah dihimpun berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPU dan Relasi. Pada prinsipnya semua Relasi di 11 kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sosialisasi di semua (11) basis masyarakat, namun karena keterbatasan halaman artikel maka akan dijelaskan kegiatan Relasi satu kabupaten satu basis masyarakat:

1. Kabupaten Sarolangun

Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan. Relawan Demokrasi Basis Kebutuhan Khusus Kabupaten Sarolangun fokus kepada masyarakat terpencil seperti Suku Anak Dalam, yakni: 1. Suku Anak Dalam di Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam, 2. Suku Anak Dalam di Desa Pematang Kabau Kec. Air Hitam, 3. Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam. Jumlah Peserta pada saat 3 kali kegiatan dihadiri oleh ± 50 orang setiap satu kali pertemuan. Waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi: pertama pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 di Desa Lubuk Jering, sosialisasi kedua pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2019 di Desa Pematang Kabau, sosialisasi ketiga pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam (Marbawi: 2019).

2. Kabupaten Batang Hari

Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula, kelompok sasarannya adalah Siswa/i SLTA sederajat dalam Kabupaten Batang Hari yang telah berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. Adapun langkah awal yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi basis pemilih pemula untuk melaksanakan sosialisasi adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah baik dalam bentuk surat maupun menemui pimpinan, guru bidang kesiswaan atau pengurus sekolah lainnya untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan sosialisasi di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi Pemilu Tahun 2019. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi pemilih pemula dapat dijabarkan sebagai berikut (Kadir: 2019) :

- a. Siswa/i Kelas XII SMK N 1 Batang Hari, Aula SMK N 1 Batanghari , Jumat, 8 Februari 2019
- b. Siswa/i Kelas XII SMA N 10 Batang Hari, Aula SMA N 10 Batanghari, Selasa, 12 Februari 2019
- c. Siswa/i Kelas XII SMK N 5 Batang Hari, Aula SMK N 5 Batanghari, Kamis, 14 Februari 2019
- d. Siswa/i Kelas XII MAN 1 Batang Hari, Aula MAN 1 Batanghari, Jumat, 15 Februari 2019
- e. Anggota PMII Kabupaten Batang Hari, Gedung BPLS Muara Bulian, Minggu, 17 Februari 2019.

3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Relasi Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, desa/kelurahan, contohnya: 1. Sosialisasi di Kantor Desa Parit Pudir, Selasa 12 Februari 2019, sasaran keluarga PKH, 2. Sosialisasi di Desa Parit Pudir Dusun Pudir Pasar, Rabu 13 Februari 2019, sasaran ibu-ibu PKH, 3. Sosialisasi di Desa Parit Pudir Dusun Parit Cagat, Kamis 21 Februari 2019, di keluarga PKH, 4. Sosialisasi di Dusun Parit Panglong Desa Mekar Jaya, Minggu 10 Maret 2019, di keluarga PKH (Ilyas: 2019).

4. Kabupaten Bungo

Basis Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas di Kabupaten Bungo memiliki perkumpulan dan telah terdaftar sebagai Lembaga resmi dalam Kabupaten Bungo yakni Sekretariat Perkumpulan Penyandang disabilitas. Berikut 3 sasaran yang telah dilaksanakan oleh Relasi Basis Disabilitas : 1. Sosialisasi Februari, Rabu & Minggu Tanggal : 06, 10, 17 & 24 Februari 2019 di Sungai Pinang, Asrama SDLB, Disabilitas Apotek Sehat & Dilubuk Landai, 2. Sosialisasi Maret, Jumat, Minggu, Senin & Selasa Tanggal : 01, 10, 11 & 12 Maret 2019 di Sekretariat PPDI Kabupaten Bungo, Simpang Babeko, Dusun Babeko & Dusun Sepungur, 3. Sosialisasi April, Senin &

Jumat Tanggal : 08 & 12 April 2019, di Sungai Pinang & Pundi Luhur, Peserta Komunitas Kepala Dusun Pundi Luhur dan Keluarga 12 Orang (Bisri: 2019).

5. Kabupaten Muaro Jambi

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi Relasi untuk menyasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Relasi membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twiter, facebook, instagram dan platform media sosial lainnya, kemudia Relasi membuat status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik tentang politik, demokrasi dan pemilu (Edison: 2019).

6. Kabupaten Tebo

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/ tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi.

Bentuk kegiatannya relasi adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa di kampus. Contoh: sosialisasi club motor team herex rimbo,

pengurus karang taruna, raider safety community, base camp club motor RKC dan VR. Rimbo Bujang, arisan pemuda, club olahraga bola voli kantor Desa Purwoharjo, dll (Bisri: 2019).

7. Kabupaten Kerinci

Jumlah DPT perempuan di Pemilu 2019 lebih besar dari laki-laki, untuk itu basis ini menjadi penting sebagai sasaran sosialisasi dan edukasi. Bentuk kegiatannya Relasi adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu kompleks, contoh: kelompok takziah Desa Kemantan, kelompok pengajian ibu Desa Koto Majidin, kelompok pengajian ibu Desa Semerap, perkumpulan ibu-ibu Desa Pendung, kelompok ibu-ibu desa Siulak Mukai, (Syarif:2019).

8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Basis pemilih komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard dan lain sebagainya. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobi, komunitas masyarakat etnis dan lain sebagainya. Contoh: PSHT Ranting Rantau Rasau, Kelompok Hadroh AlIstiqomah Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Organisasi Kemahasiswaan PMII Komisariat STIE AL-Mujaddid Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Komunitas Motor Klasik Lawas (K.M.K.L) Dusun Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kelompok Pemuda Teluk Buan Mesjid SK I, Dusun Teluk Buan, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, komunitas Mahasiswa STIES dan UT Tanjung Jabung Timur Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat (Nurdin: 2019).

9. Kota Jambi

Basis Keagamaan, basis keagamaan menggunakan forum-forum keagamaan untuk melakukan sosialisasi. Berikut sasaran Relasi Basis Keagamaan Kota Jambi: Pemilih yang aktif di berbagai etnis agama, Majelis Taklim Agama Islam, pemilih yang aktif di

jama'ah Kristen Protestan, Pemilih yang aktif di Jama'ah Kristen Katolik. Jumlah Peserta pada saat 7 x Kegiatan di hadiri oleh \pm 50 Orang setiap satu kali pertemuan.

Waktu pelaksanaan sosialisasi pertama pada hari Sabtu 23 Februari 2019 di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi. Sosialisasi kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 di Masjid Nur Aminah Pattimura. Sosialisasi ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Masjid Darrusalam Simpang Kawat. Sosialisasi keempat dilaksanakan pada hari Sabtu 02 Maret 2019 di Gereja Bethen Indonesia, Sosialisasi kelima dilaksanakan pada hari Rabu 06 Maret 2019 di Gereja Santos Paal 10. Sosialisasi keenam dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Maret 2019 di SD Xaverius II. Sosialisasi ketujuh dilaksanakan pada hari Minggu 07 April 2019 di Hotel Grand Abadi (Yatno: 2019).

10. Kota Sungai Penuh

Basis kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggiran danau kerinci, komunitas waria/LGBT di pasar sungai penuh, masyarakat miskin kota, pemulung, dll (Irwan: 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi karena 3 faktor: pertama faktor non teknis yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan politik masyarakat terkait pentingnya pemilu. Kedua faktor teknis maladministrasi pemilu yaitu tidak validnya Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, kondisi geografis dan cuaca buruk saat hari pencoblosan. Ketiga faktor politis dimana masyarakat sudah apatis tidak percaya lagi kepada calon peserta pemilu karena bermasalah seperti terlibat korupsi, banyak pelanggaran dan tidak mempunyai visi misi yang jelas.

Peran Relawan Demokrasi sangat efektif meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi dengan melakukan sosialisasi kepada 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu: 1. basis keluarga, 2. basis pemilih pemula, 3. basis pemilih muda, 4. basis pemilih perempuan, 5. basis penyandang disabilitas, 6. basis pemilih berkebutuhan khusus, 7. basis kaum marginal, 8. basis komunitas, 9. basis keagamaan, 10. basis warga internet dan 11. basis relawan demokrasi.

Sosialisasi dilakukan secara terstruktur massif dan sistematis dimana langkah awal KPU kabupaten/kota melakukan seleksi Relasi secara ketat (55 orang tiap kabupaten/kota) kemudian para Relasi dibekali dengan Training of Trainer (ToT) materi-materi kepemiluan, kemudian melakukan pemetaan sasaran per basis dan terakhir melakukan sosialisasi dengan metode yang efektif dan menghibur atau electiontainment. Dengan peran relasi ini tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi pada Pemilu Serentak 2019 naik menjadi 81,75% melebihi target nasional 77,5%.

Daftar Pustaka

- Liando, M. Daud. (2016). *Pemilu dan partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal LPP Vol 3 Tahun 2016. Unsrat.
- Moleong, J. Lexy. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratikno, 2004, *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004*, dalam M. Faried Cahyono dan Lambang.
- Rumah Pintar Pemilu KPU RI, 2016, *Potret Partisipasi Pemilih 2014*, KPU RI, Jakarta. Pedomannya Pelaksanaan
- Rumah Pintar Pemilu KPU RI, 2016, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, KPU RI, Jakarta.
- Sulastono. (2001). *Demokrasi atau Democrazy*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriyono, Arif. (2014). *Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia*. Perludem, Jakarta.
- Trijono, (Eds). *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, CSPPS Books, Yogyakarta.
- KPU Provinsi, 2019, *Laporan Evaluasi Pemilu 2019*, KPU Provinsi Jambi, Jambi.
- KPU RI, 2019, *Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2019*, KPU RI, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemerintah Republik Indonesia No.
10

Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam
penyelenggaraan pemilihan umum

Hasil Wawancara:

Wawancara bersama Desy Arianto, Komisioner KPU Provinsi Jambi Periode: 2003-2008
dan Periode: 2013-2018

Wawancara dengan Apnizal. (2019). Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat.

Wawancara dengan Mawin Marbawi. (2019). Koordinator Relasi Kab. Sarolangun,
Pada 17 Juni 2019

Wawancara dengan A. Kadir (2019). Ketua KPU Kab. Batang Hari, Pada 20 Juni 2019

Wawancara dengan M.Ilyas. (2019). Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Jabat Divisi
Sosialisasi, Pada 23 Juli 2019

Wawancara dengan M. Bisri, Ketua KPU Kab. Bungo, Pada 24 Juli 2019

Wawancara dengan Edison, Komisioner KPU Kab. Muaro Jambi dan Nando Nawawi
Relasi Basis Netizen, Pada 26 Juli 2019.

Wawancara dengan Basri, Ketua KPU Kabupaten Tebo, Pada 28 Juli 2019

Wawancara dengan Syahril Syarif, Komisioner KPU Kab. Kerinci Divisi Sosialisasi,
Pada 23 Juni 2019

Wawancara dengan Nurdin. (2019). Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
Divisi Sosialisasi dan Ade Hawati Relasi Basis Komunitas, Pada 29 Juli 2019

Wawancara dengan Yatno. (2019). Ketua KPU Kota Jambi, Pada 30 Juli 2019

Wawancara dengan Irwan. (2019). Ketua KPU Kota Sungai Penuh dan para Relasi,
Pada 29 Juni 2019.